

Pendidikan yang Membebaskan dalam Konteks Indonesia: Analisis Pemikiran Paulo Freire terhadap Kurikulum Nasional

Benediktus Hasiholan Gultom^{1*}

¹ Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Indonesia.

* Author Email: benediktusben11@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Pendidikan;
Paulo Freire;
Pendidikan
pembebasan;
Kesadaran kritis.

Article history:

Received 2024-09-27
Revised 2024-10-04
Accepted 2024-12-13

ABSTRACT

This research aims to identify the concept of “ideal educational practice” by referring to the thoughts of Paulo Freire, particularly in his book *Pedagogy of the Oppressed*, and its relation to the curriculum system in Indonesia. This study employs a qualitative approach with a literature review as the data collection technique. The findings indicate that Indonesia's curriculum is still influenced by an educational system that tends to be oppressive, as described in Freire's ideas. According to Freire, education should liberate and foster critical consciousness, enhance participation, and encourage social responsibility within the community. This research contributes to a deeper understanding of the importance of curriculum reform to create a more equitable and meaningful education system.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep “praktik pendidikan yang ideal” dengan merujuk pada pemikiran Paulo Freire, khususnya dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed*, dan kaitannya dengan sistem kurikulum di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum di Indonesia masih dipengaruhi oleh sistem pendidikan yang cenderung menindas, seperti yang dijelaskan dalam gagasan Freire. Pendidikan menurut Freire seharusnya membebaskan serta membangun kesadaran kritis, meningkatkan partisipasi, dan mendorong tanggung jawab sosial dalam komunitas. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pemahaman lebih mendalam tentang pentingnya reformasi kurikulum untuk menciptakan pendidikan yang berkeadilan dan bermakna.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



1. PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu bangsa (Abdulkarim, 2020). Di Indonesia, meskipun telah dilakukan berbagai upaya reformasi dalam sektor pendidikan, sistem yang ada masih menunjukkan banyak ketimpangan, terutama terkait dengan akses pendidikan yang adil dan merata (Saidek & Islami, 2016). Pendidikan di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh faktor sosial, keagamaan, ekonomi, dan politik yang kompleks. Kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, terutama di daerah-daerah terpencil, masih menjadi permasalahan utama yang harus dihadapi (Madiyono & Haq, 2023; Wicaksono & Friawan, 2011). Meskipun pemerintah telah membuat kebijakan untuk memperluas akses pendidikan, pada kenyataannya, banyak kelompok masyarakat, terutama dari latar belakang ekonomi lemah, belum mendapatkan pendidikan yang berkualitas (Jhon et al., 2021; Napitsunargo, 2024). Hal ini mencerminkan adanya perbedaan antara harapan bahwa pendidikan harus menjadi hak semua orang, dengan kenyataan yang menunjukkan masih adanya ketidakmerataan dalam distribusi sumber daya pendidikan (Pramana et al., 2021).

Paulo Freire, seorang filsuf dan pendidik asal Brasil, dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed* (1986) menawarkan kritik tajam terhadap sistem pendidikan yang cenderung menindas. Freire berpendapat bahwa pendidikan tradisional sering kali hanya menciptakan relasi kekuasaan antara guru dan murid, di mana murid diperlakukan sebagai objek pasif yang hanya menerima informasi. Pendidikan yang menindas ini menurut Freire hanya melanggengkan status quo dan tidak memberikan ruang bagi siswa untuk berpikir kritis serta mengembangkan kesadaran sosial. Konsep “pendidikan yang membebaskan” yang digagas Freire menekankan pentingnya membangun kesadaran kritis (*conscientization*), yang memungkinkan individu untuk memahami realitas sosial mereka dan mengambil tindakan untuk mengubahnya (Gadotti & Torres, 2009; Gultom & Haq, 2024).

Penelitian ini menjadi penting karena sistem pendidikan di Indonesia, meskipun telah mengalami banyak perubahan, masih menunjukkan gejala-gejala yang dikritik oleh Freire. Kurikulum yang ada cenderung berorientasi pada transfer pengetahuan yang pasif, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi siswa untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran (Muhajir, 2020). Penekanan pada hasil akademik dan nilai ujian juga mengabaikan pengembangan kesadaran sosial dan tanggung jawab komunitas yang lebih luas, sehingga menjauhkan pendidikan dari konsep pembebasan yang diusulkan oleh Freire.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kebijakan dan perubahan dalam sistem kurikulum pendidikan nasional Indonesia. Misalnya, Azmi dkk. (2023) mengeksplorasi implementasi Kurikulum Merdeka, yang menekankan pada kemandirian belajar siswa serta fleksibilitas dalam proses pembelajaran. Penelitian mereka memberikan pandangan tentang bagaimana kebijakan ini diterapkan dalam konteks sistem pendidikan nasional, namun belum secara khusus menelaah aspek kesadaran kritis yang dibahas oleh Freire.

Setiawan dan Suwandi (2022) menelusuri perkembangan kurikulum nasional Indonesia dari segi integrasi ilmu pengetahuan, sementara Santoso dan Murod (2021) membahas pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum terintegrasi dari tahun 1961 hingga 2013, dengan fokus pada relevansi pendidikan kewarganegaraan dalam abad ke-21. Meskipun penelitian-penelitian ini relevan dalam konteks perubahan kurikulum, mereka masih kurang memperhatikan perspektif kritis yang diajukan oleh Freire, terutama mengenai bagaimana kurikulum dapat berperan sebagai alat pembebasan atau penindasan.

Penelitian Ahid dan Chamid (2021) fokus pada implementasi kurikulum berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) di perguruan tinggi Islam, yang memperkenalkan standar kompetensi nasional. Meskipun demikian, penelitian ini tidak mendiskusikan dimensi kritis dan pembebasan yang diusung oleh Freire. Sementara itu, Setiawan (2020) memberikan gambaran umum tentang sistem pendidikan Indonesia, tetapi tidak secara eksplisit membahas

bagaimana sistem tersebut bisa menciptakan atau menghambat kesadaran kritis pada peserta didik.

Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Akrim dkk. (2022) dan Jayadiputra dan Karim (2020), berfokus pada transformasi kebijakan pendidikan Islam dan kompetensi abad ke-21 dalam pendidikan kewarganegaraan. Studi-studi ini menyoroti pentingnya pendidikan kompetensi global dalam kurikulum Indonesia, tetapi kurang menyoroti elemen kesadaran kritis yang diperlukan untuk menciptakan pendidikan yang membebaskan.

Penelitian ini berbeda dengan studi-studi sebelumnya karena secara khusus menelaah sistem pendidikan di Indonesia melalui lensa pemikiran Paulo Freire, yang menekankan pada pendidikan yang membebaskan dan pembangunan kesadaran kritis. Berbeda dari penelitian lain yang lebih berfokus pada kebijakan kurikulum atau kompetensi abad ke-21, studi ini menawarkan analisis mendalam tentang bagaimana kurikulum di Indonesia masih menunjukkan gejala pendidikan yang menindas, seperti yang dikritik oleh Freire. Fokus pada bagaimana kurikulum dapat diubah untuk menciptakan pendidikan yang membebaskan memberikan kebaruan, terutama dalam konteks peran kritis yang seharusnya dimainkan oleh pendidikan dalam membangun kesadaran sosial dan tanggung jawab komunitas.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami masalah pendidikan di Indonesia (Djunatan et al., 2024; Haq et al., 2023), khususnya terkait dengan kurikulum nasional, melalui perspektif pemikiran Paulo Freire. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep “pendidikan yang membebaskan” yang diusulkan oleh Freire dan menganalisis relevansinya terhadap sistem pendidikan di Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (*library research*), di mana penulis mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber primer dan sekunder (Lune & Berg, 2017). Sumber primer utama adalah buku karya Paulo Freire, *Pedagogy of the Oppressed*, yang menjadi landasan teori dalam penelitian ini. Buku ini memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep pendidikan yang ideal menurut Freire, termasuk kritiknya terhadap sistem pendidikan yang menindas.

Selain itu, penulis juga menggunakan sumber sekunder berupa literatur lain yang membahas kritik terhadap sistem pendidikan di Indonesia, khususnya terkait kurikulum dan implementasinya. Sumber-sumber sekunder ini mencakup artikel jurnal, buku, dan penelitian yang relevan dengan topik pendidikan, kurikulum, dan kritik Paulo Freire. Penulis menganalisis konten dari sumber-sumber ini untuk mengeksplorasi hubungan antara teori Freire dengan realitas kurikulum di Indonesia.

Setelah data dikumpulkan, penulis melakukan analisis deskriptif untuk memahami bagaimana konsep pendidikan yang membebaskan dapat diterapkan dalam konteks kurikulum nasional Indonesia, serta untuk mengidentifikasi potensi kesenjangan antara teori dan praktik. Hasil analisis ini diinterpretasikan untuk menjawab pertanyaan utama tentang seperti apa pendidikan yang ideal menurut Freire, dan bagaimana sistem pendidikan di Indonesia dapat diperbaiki menuju model yang lebih membebaskan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Memaknai Pendidikan

Dalam budaya Yunani kuno, pendidikan dapat dianalogikan seperti seorang petani yang mengolah tanah pertanian. Petani menyiapkan lahan agar benih dapat tumbuh dengan baik dan akhirnya menghasilkan buah (Jaeger, 1986). Dengan demikian, pendidikan dapat dipahami sebagai ‘medium’ atau sarana yang memiliki metode untuk memproduksi nilai dan meningkatkan nilai objeknya. Dalam proses humanisasi, pendidikan bertujuan untuk memanusiakan manusia dengan membentuk karakter dan nilai-nilai (*values*) sehingga individu

yang menjalani proses pendidikan menjadi pribadi yang unggul, memiliki *arete* atau keutamaan, serta memiliki budaya intelektual dan perhatian pada harmoni sosial berkelanjutan (Haq, 2015; Ziaul Haq et al., 2023).

Pada level humanisasi, pendidikan merupakan medium yang berfungsi untuk mengolah potensi-potensi yang dimiliki seseorang agar lebih manusiawi dan bernilai (Sugiharto et al., 2008). Proses ini membantu individu mengembangkan dirinya menuju keutuhan sebagai manusia. Pada tahap awal kehidupan, lembaga sosial pertama yang menyediakan wadah atau “lahan” untuk pendidikan adalah keluarga. Keluarga memainkan peran penting sebagai lembaga pertama yang menanamkan dasar-dasar pengetahuan kepada seorang anak.

Seorang anak, bahkan sejak dalam kandungan, sudah mampu mengenali suara ibunya, sebagaimana dijelaskan oleh ilmu biologi. Setelah lahir, seorang anak secara bertahap akan mengenali dirinya, orang-orang di sekitarnya, serta memahami banyak hal berkat bimbingan ayah, ibu, dan anggota keluarga lainnya. Pendidikan awal ini menuntun anak dalam proses perkembangan dasarnya, baik melalui doktrin maupun pengalaman yang dialaminya secara langsung.

Dalam konteks yang lebih luas, pendidikan selalu berkaitan erat dengan manusia sebagai subjek dan objeknya. Seorang anak tidak hanya dilihat sebagai penerus dalam sebuah keluarga, tetapi juga sebagai harapan dari generasi sebelumnya. Pendidikan berperan dalam membantu seorang anak mencapai keutuhan dirinya sebagai makhluk ciptaan, memahami makna hidup, dan memenuhi harapan orang tuanya serta masyarakat di sekitarnya.

3.2. Pendidikan dan Manusia

Pertanyaan “Siapakah anak itu?” bukanlah sekadar pertanyaan mengenai siapa orang tua anak tersebut atau dari mana ia berasal. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam mengenai makna seorang anak itu sendiri. Secara umum, anak adalah hasil regenerasi biologis dari hubungan antara laki-laki dan perempuan. Kehadiran anak tidak mungkin terjadi tanpa adanya proses reproduksi. Dalam banyak budaya, anak identik dengan sosok yang membawa harapan, karunia, rezeki, dan menjadi tumpuan masa depan keluarga. Seorang anak tidak hanya dianggap sebagai penerus dalam keluarga, tetapi juga sebagai harapan untuk masa depan yang lebih baik, baik bagi keluarganya, orang tuanya, maupun bagi dirinya sendiri (Gultom, 2012).

Orang tua biasanya menyematkan doa dan harapan yang baik kepada anak yang baru lahir. Jarang sekali ditemukan orang tua yang berharap hal buruk menimpa anak-anaknya. Misalnya, sangat jarang ditemukan orang tua yang berharap anaknya menjadi penjahat, perusak, atau individu yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Sebaliknya, kebanyakan orang tua menginginkan anak-anaknya tumbuh menjadi individu yang baik, berbakti kepada orang tua, santun, dan menjadi teladan. Dalam konteks kebangsaan, anak juga dipandang sebagai harapan bangsa. Pandangan ini sejalan dengan konsep regenerasi, di mana anak-anak akan menggantikan peran para pemimpin dan figur penting di masa depan. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sangat penting untuk membimbing anak-anak agar tidak terjebak dalam hal-hal negatif (Bahri, 2017).

Dalam konteks pendidikan formal, setelah mendapatkan pengetahuan dasar dari keluarga, anak kemudian memasuki tahap pendidikan yang lebih formal di bawah naungan negara. Pendidikan formal ini dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membebaskan individu dari kebodohan, serta menciptakan insan-insan yang berkualitas. Pendidikan formal ini difasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan yang disediakan oleh negara, seperti sekolah, program pembelajaran, dan materi pendidikan. Namun, dalam prosesnya, pendidikan sering kali mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh perubahan zaman dan tantangan-tantangan baru yang muncul.

Kurikulum sebagai sistem pendidikan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman. Perubahan ini bertujuan agar pendidikan dapat tetap relevan dan adaptif terhadap kebutuhan individu dan tantangan zaman. Kurikulum yang terus

berubah-ubah sering kali menimbulkan berbagai pertanyaan dan kritik. Namun, perubahan ini juga memiliki sisi positif, karena bertujuan untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan sosial dan teknologi yang semakin pesat. Meskipun demikian, perubahan kurikulum juga menimbulkan masalah, terutama ketika tantangan baru muncul di era yang berbeda.

Pada era milenium ke-3, Indonesia dan negara-negara lain di dunia menghadapi fluktuasi ekonomi yang cukup signifikan, yang sebagian besar disebabkan oleh proses industrialisasi dan perkembangan teknologi. Dampak dari perkembangan teknologi ini juga terasa dalam dunia pendidikan, terutama selama masa pandemi COVID-19 (Arini et al., 2021; Asmorajati et al., 2022). Pada masa tersebut, para peserta didik diharuskan untuk beradaptasi dengan metode pembelajaran berbasis teknologi. Penggunaan perangkat elektronik menjadi suatu keharusan, yang sering kali didorong oleh kerjasama antara perusahaan teknologi dan sekolah-sekolah. Dalam banyak kasus, perangkat tersebut dijual dengan sistem kredit, yang menimbulkan beban ekonomi tambahan bagi keluarga yang kurang mampu (Sirait et al., 2021).

Sistem pembelajaran berbasis teknologi ini memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bagi keluarga yang mampu, hal ini mungkin tidak menjadi masalah (Suyadi, 2022). Namun, bagi keluarga yang kurang mampu, hal ini bisa menjadi beban, terutama bagi anak-anak yang kesulitan untuk mengikuti mekanisme pembelajaran berbasis teknologi (Mujiburrahman, 2022). Masalah ini bukan hanya berkaitan dengan kurikulum, tetapi juga mencakup aturan dan sistem pendidikan yang diberlakukan oleh sekolah-sekolah (Naroo, 2022).

Ketidakesesuaian antara kebijakan pemerintah dan implementasi di sekolah-sekolah menjadi salah satu masalah utama dalam penerapan kurikulum. Beberapa sekolah berlomba-lomba untuk menjadi institusi yang unggul dengan meningkatkan kualitas pembelajaran, fasilitas, dan materi pembelajaran. Hal ini sering kali berdampak pada kenaikan biaya sekolah, yang pada akhirnya menyebabkan adanya stratifikasi pendidikan berdasarkan kemampuan ekonomi siswa. Pengkotak-kotakan sekolah berdasarkan ekonomi ini berdampak pada ketidakmerataan kualitas peserta didik, yang berpotensi menghambat tercapainya tujuan kurikulum nasional.

Karenanya, masalah dalam sistem pendidikan di Indonesia tidak hanya terkait dengan kurikulum yang terus berubah, tetapi juga menyangkut tantangan dalam penerapannya di lapangan. Pendidikan yang seharusnya menjadi sarana untuk mencerdaskan bangsa sering kali terhambat oleh masalah-masalah ekonomi dan sistemik yang menyebabkan ketidakmerataan akses dan kualitas pendidikan.

3.3. Pendidikan sebagai Alat Pembebasan Menurut Paulo Freire

Pendidikan pada dasarnya berkaitan dengan pertanyaan fundamental: apa tujuan dan fungsi pendidikan? Tujuan pendidikan yang beragam telah didefinisikan, seperti menumbuhkan rasa ingin tahu, meningkatkan pemahaman, memperluas imajinasi, membina kompetensi, mengembangkan otonomi, serta kepedulian pada sesama (Needham et al., 2011). Namun, sering kali muncul perbedaan antara tujuan dan fungsi pendidikan. Hal ini penting untuk ditinjau kembali, terutama dalam kaitannya dengan kurikulum yang diterapkan di institusi pendidikan. Apakah kurikulum yang dirancang telah sesuai dengan tujuan awal dan parameter keberhasilannya? Ini merupakan pertanyaan yang perlu dijawab dalam mengevaluasi pendidikan secara keseluruhan.

Salah satu tantangan besar dalam pendidikan adalah adanya pengaruh kapitalisme terhadap kurikulum (Harshman, 2018; Schulze-Cleven, 2017). Kapitalisme sering kali menciptakan situasi dilematis dalam pendidikan. Di satu sisi, kapitalis menyediakan modal yang sangat diperlukan untuk kelangsungan lembaga pendidikan (Nur, 2022). Namun, di sisi lain, modal tersebut sering kali diikuti dengan tuntutan timbal balik yang mengarah pada komersialisasi pendidikan (Mac, 2021). Misalnya, sponsor dari produk komersial tidak hanya

memberikan dana secara sukarela, tetapi mengharapkan keuntungan dari hubungan tersebut. Ini menimbulkan dualisme dalam sistem pendidikan, di mana pendidikan berfungsi untuk membebaskan, tetapi pada saat yang sama juga dapat menjadi alat yang memenjarakan individu dalam sistem yang dikendalikan oleh kepentingan kapital (Bell, 1972).

Paulo Freire, seorang filsuf pendidikan terkemuka abad ke-20, mengusung gagasan tentang "pendidikan yang membebaskan." Dalam bukunya *Pedagogy of the Oppressed* (Freire, 1986), Freire menjelaskan esensi pendidikan sebagai alat untuk membebaskan manusia dari ketertindasan. Berdasarkan pengalamannya di Brasil, Freire mengembangkan metode pendidikan yang bertujuan memberantas buta huruf di kalangan rakyat miskin. Sebagai seorang humanis, Freire berpendapat bahwa pendidikan adalah panggilan untuk memanusiakan individu. Menurut Freire, kaum tertindas mengalami dehumanisasi di bawah sistem yang menindas. Namun, mereka dapat mengubah kondisi mereka jika konsisten dalam tindakan dan tujuan.

Pandangan Freire ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial-historis Brasil dan pengalamannya terjun langsung di masyarakat. Freire juga terinspirasi oleh filsuf pendidikan seperti John Dewey (1977), yang menekankan pentingnya interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar. Selain itu, gagasan kebebasan Freire dipengaruhi oleh pemikiran Erich Fromm (2021), yang menekankan kebebasan individu untuk berkembang. Freire percaya bahwa pendidikan harus memberikan kebebasan bagi individu untuk menentukan nasib mereka sendiri dan mencapai kemanusiaan yang sejati (Hashim, 2020).

3.4. Kritik Terhadap Kurikulum dan Sistem Pendidikan

Salah satu kritik utama Freire terhadap sistem pendidikan adalah bahwa kurikulum yang dirancang sering kali menciptakan standar ganda ketika diterapkan di berbagai sekolah (Gadotti & Torres, 2009). Meskipun kurikulum mungkin tampak baik secara teoritis, dalam praktiknya, penerapan kurikulum tersebut sering kali berbeda-beda di setiap institusi. Hal ini menghilangkan esensi dari pendidikan sebagai alat pembebasan. Dalam konteks ini, Freire mengkritik sistem pendidikan yang lebih berfokus pada pemenuhan standar formal daripada pada pengembangan potensi manusia secara utuh (Freire, 1985).

Dalam konteks kapitalisme, Freire juga mengkritik bagaimana pendidikan sering kali digunakan sebagai alat untuk melanggengkan ketimpangan sosial (Freire, 2021). Pendidikan yang seharusnya membebaskan individu justru dijadikan sarana untuk mengontrol dan memenjarakan mereka dalam sistem yang hierarkis. Institusi pendidikan sering kali tidak memperhatikan latar belakang finansial peserta didik, yang menyebabkan munculnya eksklusivitas dalam akses pendidikan (Freire, 1997). Pada akhirnya, pendidikan hanya dapat diakses oleh mereka yang mampu membayar, sementara yang lain terpinggirkan.

3.5. Cinta Kasih dan Kebebasan dalam Pendidikan

Freire juga menekankan pentingnya unsur cinta kasih dalam pendidikan (Hegar, 2012). Baginya, cinta kasih adalah fondasi penting dalam membangun dialog yang bermakna antara guru dan siswa. Namun, dalam praktiknya, cinta kasih ini sering kali hilang dalam sistem pendidikan yang lebih mementingkan persaingan dan prestasi akademik. Sekolah-sekolah cenderung mengabaikan kondisi sosial dan ekonomi peserta didik, sehingga hanya mereka yang mampu membayar yang dapat menikmati fasilitas pendidikan yang berkualitas (Freire, 1986).

Selain itu, gagasan kebebasan yang diusung Freire juga mencerminkan nuansa eksistensialisme (Gadotti & Torres, 2009). Menurut Freire, manusia adalah makhluk yang bebas untuk menentukan nasibnya sendiri. Pendidikan harus memberikan ruang bagi individu untuk berekspresi, menciptakan, dan membangun identitas diri mereka. Namun, dalam sistem pendidikan saat ini, individu sering kali dibatasi oleh aturan-aturan yang kaku dan tuntutan yang menghambat kreativitas mereka. Freire melihat ini sebagai bentuk penindasan yang

halus, mirip dengan kolonialisme, di mana yang kuat akan selalu mendominasi yang lemah (Freire, 1986).

Gagasan Paulo Freire tentang pendidikan yang membebaskan menawarkan perspektif yang kritis terhadap sistem pendidikan yang ada. Pendidikan, menurut Freire, seharusnya menjadi alat untuk membebaskan manusia dari ketertindasan, bukan untuk memenjarakan mereka dalam sistem yang dikendalikan oleh kepentingan kapitalis (Freire, 1986). Pendidikan harus memperhatikan unsur cinta kasih dan kebebasan, serta memberikan ruang bagi setiap individu untuk mengembangkan potensi mereka. Gagasan ini relevan untuk mengevaluasi sistem pendidikan saat ini, terutama dalam hal penerapan kurikulum yang cenderung menciptakan standar ganda dan memperkuat ketimpangan sosial.

4. KESIMPULAN

Pada akhirnya, perlu disadari adalah bahwa kesulitan yang dihadapi dalam dunia pendidikan tidak semata-mata disebabkan oleh sistem kurikulum yang rumit. Sebaliknya, ada pengaruh eksternal yang turut memperburuk keadaan, khususnya di Indonesia. Seperti yang telah dibahas dalam tulisan ini, pendidikan saat ini seringkali dikapitalisasi dan bahkan dipolitisasi, yang pada gilirannya memperburuk kualitas pendidikan. Hal ini selaras dengan pandangan Paulo Freire, yang menyatakan bahwa selama dominasi kekuasaan dan egoisme masih mendominasi, celah penindasan akan terus ada. Akibatnya, pendidikan yang seharusnya membebaskan justru menjadi pendidikan yang mengekang.

Dalam perspektif humanisme, fenomena ini berlawanan dengan konsep perkembangan diri dan pemurnian manusia. Pendidikan seharusnya membantu membangun kesadaran peserta didik bahwa mereka dapat tumbuh dalam konteks kebersamaan dengan orang lain dalam suatu komunitas. Kesadaran ini penting karena manusia hidup dalam hubungan sosial, yang seharusnya menumbuhkan kesadaran individu tentang dirinya sebagai subjek yang integral dalam komunitas. Sebagai bagian dari komunitas, individu diharapkan memiliki rasa peka dan tanggap terhadap situasi internal dan eksternal, baik dalam hal kewajiban, tanggung jawab, maupun kontribusinya pada kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Melalui pendidikan, peserta didik harus disadarkan akan hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat. Oleh karena itu, institusi pendidikan seharusnya memiliki visi yang jelas terhadap capaian prestasi dan kelayakan pendidikan. Namun, visi tersebut harus sejalan dengan misi untuk mengembangkan peserta didik secara menyeluruh. Lembaga pendidikan, terutama sekolah, harus dapat menyadari bahwa fenomena perbudakan dalam dunia pendidikan, meskipun tidak bersifat fisik, tetap terjadi dalam bentuk kontrol yang mengekang potensi peserta didik. Pendidikan juga harus menciptakan kesadaran baru terhadap kondisi sosial yang ada, dan memberikan ruang bagi kebebasan berpikir serta berinovasi.

Berdasarkan pemikiran Paulo Freire, semua pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan—termasuk lembaga pendidikan, kementerian, sekolah, peserta didik, tenaga pengajar, staf manajemen, keluarga, dan masyarakat—harus terarah pada tujuan dan makna pendidikan yang sebenarnya. Dengan demikian, terciptalah pendidikan yang bermutu dan dapat mewujudkan cita-cita pendidikan itu sendiri, yakni pembebasan dan pemberdayaan manusia untuk mencapai potensi maksimal dalam kehidupan sosialnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkarim, A. (2020). Development of a unity in diversity-based pancasila education text book for Indonesian universities. *International Journal of Instruction*, 13(1), 371–386. <https://doi.org/10.29333/iji.2020.13125a>
- Ahid, N., & Chamid, N. (2021). Implementation of Indonesian National Qualification Framework Based Curriculum in Higher Islamic Education. *Jurnal Pendidikan Islam*, 7(1), 109–122.

- Akrim, A. (2022). Transformation of Islamic education curriculum development policy in the national education system. *Cypriot Journal of Educational Sciences*, 17(7), 2538–2552. <https://doi.org/10.18844/cjes.v17i7.7685>
- Arini, P. D., Matin, M., & Zulaikha, S. (2021). Curriculum management during the covid-19 emergency. *Journal of Education Research and Evaluation*, 5(2).
- Azmi, C., Hadiyanto, H., & Rusdinal, R. (2023). National Curriculum Education Policy" Curriculum Merdeka And Its Implementation". *International Journal of Educational Dynamics*, 6(1), 303–309.
- Bahri, S. (2017). Pengembangan Kurikulum Dasar Dan Tujuannya. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 11(1), 15. <https://doi.org/10.22373/jiif.v11i1.61>
- Bell, D. (1972). The cultural contradictions of capitalism. *Journal of Aesthetic Education*, 6(1/2), 11–38.
- Dewey, J. (1977). *The Poems of John Dewey*. SIU Press.
- Djunatan, S., Haq, M. Z., Viktorahadi, R. F. B., & Samosir, L. (2024). *Kiat Sukses Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa*. Gunung Djati Publishing.
- Freire, P. (1985). Reading the world and reading the word: An interview with Paulo Freire. *Language Arts*, 62(1), 15–21.
- Freire, P. (1986). *Pedagogy of the Oppressed*. Praeger.
- Freire, P. (1997). Paulo Freire (1921 – 1997). In *Internet Encyclopedia of Philosophy*.
- Freire, P. (2021). *Education for critical consciousness*. Bloomsbury Publishing.
- Fromm, E. (2021). *The fear of freedom*. Routledge.
- Gadotti, M., & Torres, C. A. (2009). Paulo Freire: education for development. *Development and Change*, 40(6), 1255–1267.
- Gultom, B. H., & Haq, M. Z. (2024). Peace Education: Philosophical Analysis and Review of Nonviolent Character Education Practices. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 7(1), 115–124. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/hanifiya.v7i1.34663>
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama.
- Haq, M. Z. (2015). *SEKOLAH BERBASIS NILAI: 7 Tahap Menghidupkan Nilai, Softskill, dan Hardskill*. Ihsan Press.
- Haq, M. Z., Aprianti, P., & Djunatan, S. (2023). Eksistensi Perempuan Sunda Berdasarkan Dimensi Sunan Ambu dalam Epos Lutung Kasarung. *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*, 6(1), 13–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.15575/hanifiya.v6i1.24087>
- Harshman, J. (2018). Developing global citizenship through critical media literacy in the social studies. *Journal of Social Studies Research*, 42(2), 107–117. <https://doi.org/10.1016/j.jssr.2017.05.001>
- Hashim, A. (2020). Investigating effective teaching strategy for tafseer of quran: An empirical study. In *Journal of Critical Reviews* (Vol. 7, Issue 2, pp. 712–717). <https://doi.org/10.31838/jcr.07.02.131>
- Hegar, R. L. (2012). Paulo Freire: Neglected mentor for social work. *Journal of Progressive Human Services*, 23(2), 159–177.
- Jaeger, W. (1986). *Paideia: The Ideals of Greek Culture (Vol III): The Conflict of Cultural Ideals in the Age of Plato* (Vol. 3). Oxford University Press.
- Jayadiputra, E., & Karim, A. A. (2020). 21st Century Competences in Civic Education Curriculum of Indonesia. *2nd Annual Civic Education Conference (ACEC 2019)*, 99–102.
- Jhon, W., Zubaidah, E., & Mustadi, A. (2021). Challenges in the implementation of character

- education in elementary school: experience from Indonesia. *Ilkogretim Online*, 20(1).
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences*. Pearson.
- Mac, S. (2021). School Choice, Disaster Capitalism, and the Reproduction of Inequality for Historically Marginalized Students. *Neoliberalism and Inclusive Education*. <https://doi.org/10.1108/S1529-210X20210000017002>
- Madiyono, M., & Haq, M. Z. (2023). Integritas Terbuka sebagai Pendekatan Baru Dialog Antariman dalam Penguatan Moderasi Beragama. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 2(1), 1–16. <https://doi.org/10.59029/int.v2i1.11>
- Muhajir, A. (2020). Approach to the development of multicultural education curriculum in darul hikmah modern Islamic boarding school Tulungagung, Indonesia. *Universal Journal of Educational Research*, 8(5), 1842–1847. <https://doi.org/10.13189/ujer.2020.080520>
- Mujiburrahman. (2022). Reformulation of Competency Development of Lecturers of State Islamic Religious Universities in Indonesia After Covid-19. *Asian Journal of University Education*, 18(1), 15–33. <https://doi.org/10.24191/ajue.v18i1.17165>
- Napitsunargo, H. (2024). *Future is now: skepticism, new reality and infinities*. Unobtainium Photobooks.
- Naroo, S. A. (2022). The impact of COVID-19 on global contact lens education. *Journal of Optometry*, 15(1), 60–68. <https://doi.org/10.1016/j.optom.2020.11.002>
- Needham, P., Weisberg, M., & Hendry, R. (2011). Philosophy of Education. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*.
- Nur, A. (2022). Kapitalisme Pendidikan dan Reinventing Paradigma Pendidikan Indonesia. *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 3(1), 69–84. <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.94>
- Pramana, C., Chamidah, D., Suyatno, S., Renadi, F., & Syaharuddin, S. (2021). Strategies to Improved Education Quality in Indonesia: A Review. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*, 12(3).
- Saidek, A. R., & Islami, R. (2016). Character Issues: Reality Character Problems and Solutions through Education in Indonesia. *Journal of Education and Practice*, 7(17), 158–165.
- Santoso, G., & Murod, M. (2021). The Meaningfulness of Civic Education in Integrated Education Curriculum From Year 1961-2013 in Indonesia 21st Century. *World Journal Of Business, Project And Digital Management*, 2(02), 170–176.
- Schulze-Cleven, T. (2017). Worlds of higher education transformed: toward varieties of academic capitalism. *Higher Education*, 73(6), 813–831. <https://doi.org/10.1007/s10734-017-0123-3>
- Setiawan, A. R. (2020). Introducing the Indonesian education system. *Alobatuio Research Society (ARS) Indonesia*.
- Setiawan, B., & Suwandi, E. (2022). The development of Indonesia national curriculum and its changes: The integrated science curriculum development in Indonesia. *Journal of Innovation in Educational and Cultural Research*, 3(4), 528–535.
- Sirait, S., Murniarti, E., & Sihotang, H. (2021). Implementation of Hots-Based Learning and Problem Based Learning during the Pandemic of COVID-19 in SMA Budi Mulia Jakarta. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 8(2), 296–305.
- Sugiharto, B., Samho, B., Djunatan, S., Wisok, J., Bolo, A. D., Djehanih, D., Endar, H., Subianto, A., Laku, S. K., Hali, D., & Tarpin, L. (2008). *Humanisme dan Humaniora* (B. Sugiharto (ed.); 2nd ed.). Pustaka Matahari.
- Suyadi. (2022). COVID-19 ambassadors: Recognizing Kampus Mengajar at the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program humanitarian projects in the tertiary education curriculum.

- Frontiers in Education*, 7. <https://doi.org/10.3389/feduc.2022.902343>
- Wahyu Asmorojati, A., Yudhana, A., Nuryana, Z., & Binti Siraj, S. (2022). COVID-19 ambassadors: Recognizing Kampus Mengajar at the Merdeka Belajar Kampus Merdeka program humanitarian projects in the tertiary education curriculum. *Frontiers in Education*, 7, 902343.
- Wicaksono, T. Y., & Friawan, D. (2011). Recent developments in higher education in Indonesia: Issues and challenges. *Financing Higher Education and Economic Development in East Asia*, 159–187.
- Ziaul Haq, M., Philips, G., Viktorahadi, R. F. B., & Wibisono, M. Y. (2023). Fortifying from Radicalism: Campuses' and Students' Efforts in Indonesia and Malaysia. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 6(1), 65–78. <https://doi.org/10.15575/jt.v6i1.24446>